

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z. (2012). Rekonstruksi batas Persil Bidang Tanah tanah di Aceh pasca tsunami: beberapa aspek dan permasalahannya.
- Aditya, T., Maria-Unger, E., Berg, C., Bennett, R., Saers, P., Syahid, H. L., ... & Sutejo, D. (2020). *Participatory Land Administration in Indonesia: Quality and Usability Assessment. Land. 9 (3), 79.*
- Amrynudin, A. D. K., Dharmaningtias, D. S., Savira, E. M., Katharina, R., & Sejati, S. B. (2021). Kebijakan satu data Indonesia. Publica Indonesia Utama.
- Andini, M. P. (2017). Rekonstruksi batas Persil Bidang Tanah sebagai hasil dari mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa batas (Studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 6(1), 66–79.*
- Atmaja, D. M. (2025). Analisis kerentanan wilayah berbasis SIG di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 13(2), 283–299.*
- Aulia, S. D. (2020). Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya mencegah sengketa pertanahan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya) [Skripsi, UIN Ar-Raniry].
- Badan Informasi Geospasial. (2024). BIG gelar temu kerja percepatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan. Berita Resmi BIG. Retrieved from <https://big.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar. (2023). Kecamatan Gianyar Dalam Angka 2023. Gianyar: BPS Kabupaten Gianyar.
- Budiarta, I. G., & Suryana, I. G. P. E. (2024). Pemetaan wilayah desa berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geografi Undiksha.*
- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of geographical information systems. Oxford University Press.*
- Dale, P., & McLaughlin, J. (1999). *Land administration: Oxford University Press. New York, United States, 184.*

- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2016). *Fit-for-purpose land administration: Guiding principles for country implementation*. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) & Global Land Tool Network.
- Gustiani, D. (2023). Penegasan Batas Wilayah Desa Menggunakan Metode Kartometrik dan Citra Satelit: Studi Kasus di Desa Wanasari. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia. <https://repository.upi.edu/100777>
- Hanifati, A., Adhim, N., & Suradi. (2023). Harmonisasi data pertanahan dalam mendukung tertib administrasi pertanahan. *Jurnal Tunas Agraria*.
- Hayuningtyas, W. L. P. (2019). Pemetaan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun 2009–2019 [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Irwansyah, E. (2013). Sistem informasi geografis: prinsip dasar dan pengembangan aplikasi. DigiBook Yogyakarta.
- Isnandar, N. (2022). Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital. SIP Publishing.
- Jones, R. (2004). *Practising state consolidation in early modern England and Wales. Political Geography*, 23(5), 597-624.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2016). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jakarta: ATR/BPN.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Statistik Lahan Pertanian Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Krisna Eka Putra, I. W. (2021). Kajian risiko bencana berbasis SIG di Kabupaten Buleleng. *Jurnal ENMAP*.
- Krisna Eka Putra, I. W., & Atmaja, D. M. (2021). Analisis permasalahan batas wilayah antara Desa Pengulon dan Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. *Jurnal ENMAP (Environment & Mapping)*.
- Kusmiarto. (2017). Permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Pertanahan*, 7(1), 25–38.
- Kyem, P. A. (2001). *Power, participation, and inflexible institutions: an examination of the challenges to community empowerment in participatory GIS applications. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization*, 38(3-4), 5-17.

- Lehni, N. P., Putra, I. W. K. E., & Budiarta, I. G. (2024). Pemetaan Persil Bidang Tanah Melalui Survei Lapangan di Desa Dawan Kaler Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. *Jurnal ENMAP (Environment and Mapping)*, 5(1), 12-22.
- Lin, L., & Zhang, C. (2021). *Land parcel identification. In Agro-geoinformatics: Theory and Practice (pp. 163-174). Cham: Springer International Publishing.*
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems.* John Wiley & Sons.
- Maharani, A. R. (2024). Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Martono, D. B., Aditya, T., Subaryono, S., & Nugroho, P. (2021). *The legal element of fixing the boundary for Indonesian complete cadastre. Land*, 10(1), 49.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). Metodologi penelitian kualitatif.
- Muhammad, Y. F. W., Haryanto, A., & Ahmad, D. N. F. (2021). Hambatan Praktik PTSL: Pajak, Alas Hak, dan Absentee Land. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang*.
- Nadeak, H., Dalla, A. Y., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2015). Batas wilayah desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja*, 7(3), 239–250.
- Nugroho, O. C. (2018). Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights. *Jurnal HAM*, 9, 87.
- Nurhidayani, A. F., Osly, P. J., & Ihsani, I. (2019). Hubungan aksesibilitas terhadap tingkat perkembangan wilayah desa di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Infrastruktur*, 4(2).
- Nusa Bali. (2022, Mei 22). Plang Batas Wilayah Bikin Panas Dua Desa. Retrieved from <https://www.nusabali.com>
- Panjaitan, N. A. P., Azzahara, S., & Sugandi, D. (2023). Analisis Identifikasi Bidang Persil Tanah Kota Cimahi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal Teknik Sipil*, 8(2), 60-71.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2013). Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1574/01-B/Hk/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegal Tugu.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2013). Profil wilayah Kabupaten Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar.

- Pemerintah Kabupaten Gianyar. (2022). Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. <https://peraturan.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. *Retrieved from* <https://peraturan.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2016. <https://peraturan.go.id>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.
- Pinuji, S. (2016). Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan *One Map Policy*". BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(1), 48-64.
- Prabowo, H. L. (2011). Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (Studi Kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang) (*Doctoral dissertation*, Tesis, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, Hlm. 12).
- Pramana, A. Y. E. (2017). Tingkat aksesibilitas transportasi publik di Kota Yogyakarta. Jurnal Rekar Ruang, 1(1).
- Purwaningrat, N. L. P. (2024). Kajian perkembangan penggunaan lahan dan dinamika wilayah di Kabupaten Gianyar
- Purwaningrat, P. A. (2024). Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Program Penanaman Obat Di Puspa Aman Desa Tegal Tugu Gianyar. Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(3), 1-9
- Ramadhony, A. B., Awaluddin, M., & Sasmito, B. (2017). Analisis pengukuran Persil Bidang Tanah dengan menggunakan GPS pemetaan. Jurnal Geodesi Undip, 6(4), 305-315.
- Randa, G. (2023). Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Persil Bidang Tanah Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains, 2(1), 9-17.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Jakarta: Sekretariat Negara

Sandra, A., Zuriyani, E., Rahmat, F., & Belvandi, F. (2024). Analisis Verifikasi Teknis Penegasan Dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Dikota Jayapura Provinsi Papua.

Sangadji, M. R. P., Akil, A., & Sutopo, Y. K. D. (2021). Hubungan perkembangan gunalahan dengan peningkatan aksesibilitas di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar. *Jurnal Wilayah dan Kota Maritim*, 4(1).

Santoso, U. (2012). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Kencana Prenada Media Group.

Sardiana, I. G. A., & Windia, W. (2018). Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat di Bali: Kajian Studi Kasus di Desa Nyuh Kuning, Ubud, Gianyar. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 67–90. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/39302>

Sari, D. P. (2021). Dampak pemekaran wilayah terhadap kualitas data administrasi pertanahan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(3), 210–220.

Silviana, A. (2019). Kebijakan satu peta (*One map policy*) mencegah konflik di bidang administrasi pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195-205.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.

Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).

Suryana, I. G. P. E. (2023). Implementasi SIG dalam analisis keruangan wilayah desa di Bali. *Jurnal Geografi Undiksha*.

Treman, I. W., & Krisna Eka Putra, I. W. (2020). Pengelolaan data kebencanaan berbasis WebGIS di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v8i2.27659>

- Treman, I. W., & Wisnawa, I. G. Y. (2023). Kajian pemetaan dan analisis kesesuaian lahan berbasis SIG di wilayah Bali Utara. *Jurnal ENMAP (Environment & Mapping)*.
- Wahyuni, S. (2020). Analisis ketidaksesuaian batas administrasi dengan data pertanahan pada wilayah perkotaan. *Jurnal Pertanahan Indonesia*, 10(2), 85–94.
- Wahyuningsih, S., & Istania, R. (2021). Analisis *Overlap* Wilayah dalam Pelaksanaan *One Map Policy* di Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 4(1), 75–90. <https://journal.uui.ac.id>
- Wanapertiwi, A. P. (2023). Kepastian hukum terhadap sertifikat tanah berbasis elektronik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Williamson, I. P., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). *Land Administration for Sustainable Development*. Redlands, CA: ESRI Press.
- Yuntarto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik Minat Perencanaan Pembangunan Daerah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang).
- Zaen, H. M. (2024). Implementasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Di Kecamatan Pati Kabupaten Pati (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Zakout, W., Wehrmann, B., & Törhönen, M-P. (2006). *Good governance in land administration: Principles and good practice*. Washington DC: World Bank.